

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia Pemerintah Daerah diberikan suatu wewenang dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri atau atau disebut dengan otonomi daerah. Kewenangan ini juga menyangkut wewenang mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah dengan menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk laporan kinerja keuangan yang telah dicapai selama satu periode.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu gambaran hasil kinerja pencapaian daerah atas aktivitas tertentu yang menggunakan dana dalam bentuk belanja atau pembayaran serta dana pendapatan yang diterima dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer sumbangan dan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Pratama et, al. 2005). Laporan keuangan berfungsi sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan oleh

berbagai pihak yang berkepentingan. Banyak pihak yang memerlukan informasi atas laporan keuangan yang dipublikasi oleh pemerintah daerah, agar laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat dipercaya, maka dibutuhkan auditor yang berperan dalam menjembatani kepentingan pengguna laporan keuangan dan penyedia laporan keuangan. Pernyataan auditor melalui opini akan membuat data-data yang ada di dalam laporan keuangan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021. LHP LKPD tersebut diserahkan Oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT (Adi Sudiby) kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang (Daniel Taimenas) dan Bupati Kupang (Korinus Masneno) secara langsung di Oelamasi Kabupaten Kupang. Atas LKPD TA 2021 Kabupaten Kupang, BPK RI memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut sama dengan opini TA 2020. (Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 21/07/2022).

Atas LKPD TA 2021 Kabupaten Kupang BPK RI memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut sama dengan Tahun 2020. Permasalahan yang masih menjadi pengecualian atas LKPD Kabupaten Kupang TA 2021 yaitu Aset Tetap yang terdiri dari:

1. Aset tetap tanah yang belum bisa dicatat, bernilai RP1/0 atau belum sesuai harga wajar, dan asset tanah yang belum dapat ditelusuri keberadaanya;

2. Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang belum dapat ditelusuri keberadaannya dan belum diatribusi/dikapitalisasi ke aset induk;
3. Aset Tetap Hibah yang belum dapat dicatat; dan
4. Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan yang belum dapat ditelusuri kejelasan status penyelesaiannya, dan tidak sesuai dengan kondisi rill.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang juga merupakan salah satu instansi pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedinasan ini memiliki tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan daerah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi kekurangan volume pembayaran pada empat paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Anggaran Pembayaran Pada Empat Paket Pekerjaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
No	Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Kelebihan (Rp)
1.	Peningkatan Ruas Jalan Tarus – Baumata	9.238.100.000,00	9.238.100.000,00	82.893.149,78
2.	Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Naibonat – Nunkurus	3.537.764.000,00	3.537.764.000,00	40.451.768,91
3.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Fatukanutu	4.974.554.000,00	4.974.554.000,00	61.804.752,64
4.	Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Oeibiteno-Hauloko	6.870.700.000,00	6.870.700.000,00	60.201.524,13
Total		24.621.118.000,00	24.621.118.000,00	245.351.195,46

Sumber: LHPKabupaten Kupang, 2021

Berdasarkan tabel rekapitulasi data diatas dapat lihat bahwa, penggunaan dana anggaran 100% di pakai untuk tiap-tiap paket pekerjaan. Namun hasil

pemeriksaan fisik di lapangan bersama PPK ternyata terdapat kelebihan biaya pembayaran di setiap paket pekerjaan. Hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan pekerjaan masing-masing paket pekerjaan mengalami sekali perubahan kontrak yang dituangkan dalam Addendum I Nomor 602/563/PU/2021.

Dengan adanya fenomena dan masalah yang terjadi diatas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang masih jauh dari kriteria karakteristik laporan yang ditentukan yaitu keterandalan. Mengingat bahwa keterandalan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan Keputusan. Unsur keterandalan ini berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas, dimana dibutuhkan peran sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kemampuan serta bertanggung jawab (akuntabilitas) dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dibuat dapat diandalkan/dipercaya.

Alasan penulis memilih variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas karena kompetensi sumber daya manusia sendiri menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan harus memiliki kemampuan (kompetensi) serta pengetahuan sehingga dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kualitas sumber daya manusianya. Terlepas dari itu akuntabilitas sebagai seorang pegawai yang berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan memiliki tanggung jawab atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan dalam menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan.

Masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang, dimana instansi ini melakukan kelebihan pembayaran pada empat paket pekerjaan yang tertera pada tabel rekapitulasi diatas. Berdasarkan masalah yang terjadi diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang belum menerapkan kedua variabel tersebut atau belum memenuhi standar kualitas laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan rendah.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran yang dapat diharapkan menjadi sumber bacaan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan berfikir agar dijadikan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para penelitian lainnya sebagai sumber kajian ilmiah tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang.